

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.03.2.693042/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01
Tanggal : 21 Februari 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 3. Provinsi : (25) PAPUA
- 4. Kode>Nama Satker : (693042) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA
- Sebesar : Rp. 660.000.000 (ENAM RATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.03.BB Program Pembentukan Regulasi
- 135.03.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 660.000.000
Rp. 660.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 660.000.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 660.000.000

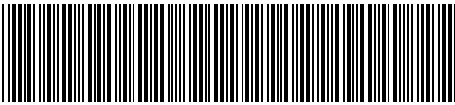
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693042/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:1042-0370-8828-9657

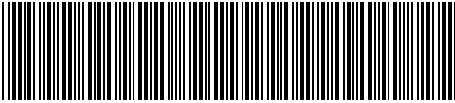
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (693042) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi						660.000.000	
Kegiatan	:	7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah						660.000.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan							
		2. 01	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum							
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				45,00	Rekomendasi Kebijakan	617.502.000	
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah			45,00	Rekomendasi Kebijakan	617.502.000	
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM				13,00	Orang	16.815.000	
Rincian Output	:	01	ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah			13,00	Orang	16.815.000	
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				1,00	Laporan, Layanan	25.683.000	
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah			1,00	Laporan	25.683.000	

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693042/2025
I B. SUMBER DANA



DS:1042-0370-8828-9657

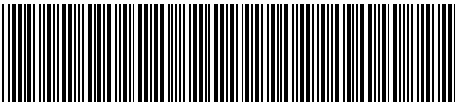
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (693042) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

				Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	660.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	660.000.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	(dalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693042/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1042-0370-8828-9657

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (693042) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA
Kewenangan : (KD)

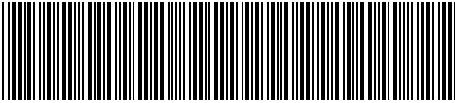
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693042	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA	-	660.000	-	-	-	660.000	25 . 51	
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	660.000	-	-	-	660.000		
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	660.000	-	-	-	660.000		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	617.502	-	-	-	617.502		
01	RM	-	617.502	-	-	-	617.502		
7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	16.815	-	-	-	16.815		
01	RM	-	16.815	-	-	-	16.815		
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	25.683	-	-	-	25.683		
01	RM	-	25.683	-	-	-	25.683	063@	
JUMLAH		-	660.000	-	-	-	660.000		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693042/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:1042-0370-8828-9657

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (693042) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

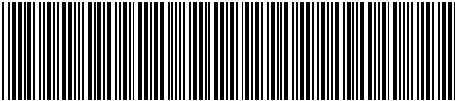
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693042	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	1.800	679	679	359.347	18.566	112.573	71.106	27.713	37.810	29.727	660.000
		BELANJA BARANG	0	0	1.800	679	679	359.347	18.566	112.573	71.106	27.713	37.810	29.727	660.000
		Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	0	0	1.800	679	679	359.347	18.566	112.573	71.106	27.713	37.810	29.727	660.000
	135.03.BB.7129	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	1.800	679	679	359.347	18.566	112.573	71.106	27.713	37.810	29.727	660.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693042/2025
IV A. B L O K I R



DS:1042-0370-8828-9657

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [693042] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

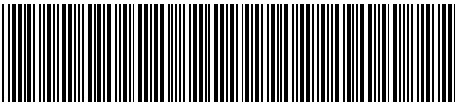
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693042	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 499.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.480
	52 Belanja Barang Rp. 499.000		Efisiensi Belanja K/L 2025
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7129	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.970		
	Efisiensi Belanja K/L 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522141 Belanja Sewa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.300		
	Efisiensi Belanja K/L 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 414.257		
	Efisiensi Belanja K/L 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.290		
	Efisiensi Belanja K/L 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.703		
	Efisiensi Belanja K/L 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693042/2025
IV B. C A T A T A N



DS:1042-0370-8828-9657

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [693042] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001